

HUBUNGAN NILAI DAN KEHARMONISAN HIDUP SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN HUKUM

Darji Darmodiharjo*

ABSTRACT

The term "value" refers to a quality or condition of something that gives benefits to humankind, mentally and/or physically. Every one has his/her own values system in dealing with certain problems during his/her lifetime. There are many methods in searching of values. Every method can produce an answer that may be different from other methods. It is suggested not to contradict them, but utilize those values appropriately depending on the context and necessity. Only by this way we can harmonize the values in our lives.

I. PENDAHULUAN

Dalam Jurnal *Era Hukum* No. 9/Th. 3/Juli 1996, penulis telah menyinggung sedikit pengertian tentang konsepsi nilai. Konsep itu lalu dikaitkan dengan Pancasila serta penjabarannya dalam sistem hukum dan sistem norma hukum di Indonesia.

Dalam diskusi di berbagai kesempatan, penulis mendapat kesan adanya ketidakjelasan sementara pihak mengenai masalah nilai ini. Tulisan ini sebenarnya ditujukan untuk memberikan sedikit bahan renungan berkenaan dengan salah satu sisi penting dari pengertian nilai. Dalam konteks filsafat hukum, misalnya, orang sering mempertanyakan upaya filsafat hukum untuk mencari hakikat hukum yang benar dan adil. Boleh jadi akan banyak orang yang mengatakan, bahwa upaya tersebut telah terbukti gagal menghadirkan hukum yang benar dan adil. Bukankah Aliran Hukum Kodrat lahir karena kegagalan upaya itu?

Filsafat memang mengajarkan kita untuk berupaya mencari kebenaran. Pisau analisis untuk mencari kebenaran filosofis itu sementara ini cukup mengandalkan logika manusiawi. Padahal, di samping logika, masih banyak jalan menuju kepada "kebenaran" itu. Dengan demikian, pada kenyataannya kita melihat bahwa tidak ada "kebenaran" tunggal. Masing-masing sudut pandang dapat saja benar, bergantung pada kebutuhan dan kemanfaatan yang diinginkan.

Persoalannya adalah bagaimana menempatkan "kebenaran-kebenaran" itu dalam konteks kehidupan manusia, sehingga semuanya dapat diterima secara utuh tanpa

* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

menimbulkan konflik nilai. Hal inilah yang kiranya ingin didiskusikan lebih jauh dalam subbab-subbab berikut ini.¹

II. HAKIKAT NILAI

Salah satu sifat filsafat yang utama adalah refleksif kritis. Refleksi berarti pengendapan dari apa yang dipikirkan secara berulang-ulang dan mendalam (kontemplatif). Pengendapan itu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan jawaban atas pertanyaan yang lebih jauh lagi, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Kritis berarti analisis yang dibuat oleh filsafat tidak berhenti pada fakta saja, melainkan analisis nilai. Jika hanya fakta yang dianalisis, berarti subjek (manusia) baru melakukan observasi, dan hasilnya adalah gejala-gejala semata. Pada analisis nilai, hasilnya bukan lagi gejala-gejala, melainkan hakikat.

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang berfilsafat, dan dengan sendirinya ini berarti, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat menilai. Nilai secara sederhana dapat diartikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Sesuatu yang bernilai pasti mengandung manfaat tertentu bagi manusia. Jadi ukuran bernilai atau tidaknya sesuatu adalah kepentingan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah.

Kepentingan lahiriah lazimnya memerlukan pemenuhan lebih dulu agar manusia dapat bertahan hidup. Manusia pada dasarnya menginginkan pemuasan kepentingan ini sebesar-besarnya, dan tidak ingin membagi-bagikannya kepada orang lain. Alasannya sederhana saja: dengan membagi kepentingannya, maka porsi yang dinikmati akan menjadi lebih kecil. Kepentingan lahiriah, dengan demikian, bersifat kompetitif. Sebaliknya, kepentingan spiritual bersifat kooperatif. Manusia merasa senang membagi-bagi kepentingan spiritualnya kepada sebanyak mungkin orang. Dengan berbuat demikian, ia tidak merasa dirugikan, tetapi justru merasa bertambah "kaya". Ralph B. Winn² memberi contoh yang baik tentang hal ini. Jika seorang guru memberikan penjelasan kepada muridnya, kata Winn, guru tersebut tidak kehilangan apapun, justru — apabila ia memang seorang guru yang baik — sepantasnya ia merasa berbahagia karena dapat membantu anak didiknya.

Kepentingan sendiri dapat diidentikkan identik dengan kebutuhan. Abraham Maslow, misalnya, dalam Teori Hirarki Kebutuhannya menyebutkan lima kebutuhan manusia, yaitu:

¹ Uraian lebih mendalam mengenai ini baca: Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali), 1996.

² Ralph B. Winn, ed. *A Survey of American Philosophy*, Patterson: Littlefield, Adams & Co., 1965, hlm. 31.

(1) fisiologi; (2) rasa aman (*security*); (3) afiliasi atau akseptansi; (4) penghargaan (*esteem needs*); (5) perwujudan diri (*self actualization*).³

Walaupun memang kebutuhan manusia tidak selalu persis mengikuti jenjang di atas, tetapi dapat dipastikan bahwa nilai-nilai yang dianut seseorang atau sekelompok masyarakat sangat bergantung pada seberapa jauh kebutuhannya telah tercukupi. Seperti dikatakan oleh Ralph B. Winn:⁴

There is a noteworthy truth which no social philosopher or psychologist dares to deny: that it is usually a waste of time to speak of lofty and noble things before an audience of hungry people. First give them food, enough to dispel their worries about tomorrow; provide them with secure jobs, to take care of their families. This will release their minds from the yoke of the flesh, and some of them will gladly listen to problems concerning humanity, knowledge and taste. All this is true; nevertheless, values cannot be fully explained as mere products of bodily needs and pressures.

Ralph B. Winn juga menyatakan bahwa nilai pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu nilai biologis, nilai kultural, dan nilai integratif.⁵

Klasifikasi yang pertama adalah nilai biologis. Nilai ini berkaitan dengan dua hal, yaitu *life-promoting* dan *life-frustrating*. Ada tiga pasang nilai biologis yaitu nilai: (1) senang dan sedih; (2) sehat dan sakit; (3) kuat dan lemah. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, nilai biologis tersebut dilengkapi pula dengan nilai-nilai sosial, yang meliputi: pasangan nilai: (1) status sosial tinggi dan rendah; (2) kemasyhuran dan ketercelaan; (3) kemakmuran dan kemiskinan. Dalam memuaskan kepentingannya, manusia ternyata tidak selalu berpikir dalam jangka pendek. Manusia dapat mengendalikan keinginannya untuk tujuan lain di masa depan yang lebih berguna baginya, sekalipun hal itu masih belum pasti dapat diraihinya. Nilai-nilai untuk mengendalikan kepentingan ini disebut nilai kultural, yang terdiri dari tiga pasang nilai, yakni: (1) kebaikan dan kejahatan; (2) keindahan dan keburukan; serta (3) kebenaran dan kekeliruan. Manusia menyadari, bahwa nilai-nilai yang disebutkan di atas dapat dicapai dengan baik apabila kita dapat menghindari hal-hal, seperti peperangan dan revolusi yang tidak perlu, sehingga menimbulkan permusuhan dan ketidaktertiban. Di sini lalu dibutuhkan nilai-nilai integratif, yang membantu manusia mengatur kehidupan dalam diri dan lingkungannya. Ada tiga pasang nilai integratif, yaitu: (1) kebahagiaan dan kesengsaraan; (2) ketertiban sosial dan kekacauan sosial; (3) keimanan dan kedurhakaan pada Tuhan.

³ Harold Koontz *et al*, *Manajemen*, terjemahan Gunawan Hutaaruk, ed., Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1986, hlm. 119. Teori Maslow ini telah mendapat banyak reaksi, baik yang mendukung maupun yang membuktikan sebaliknya, antara lain penelitian dari E.E. Lawler dan J.L. Suttle, serta Clayton P. Alderfer.

⁴ Ralph B. Winn, ed., *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

⁵ *Ibid.*, hlm. 25-28.

Klasifikasi nilai yang diberikan oleh Ralph B. Winn, semakin memperjelas keterkaitan antara nilai dan kepentingan manusia. Nilai merupakan keputusan yang diberikan oleh subjek (manusia) setelah melakukan pertimbangan atas objek-objek tertentu. Ukuran untuk melakukan pertimbangan (penilaian) tersebut dapat saja berbeda bergantung pada sudut pandang si subjek, dan sudut pandang ini berkaitan dengan kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Memang, sebagaimana dikatakan Albert Einstein, penilaian subjektif tentang ruang dan waktu sepenuhnya bergantung pada si penganutnya.

Sekumpulan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dapat diistilahkan dengan sistem nilai. Artinya, tiap orang memiliki sistem nilainya sendiri. Sistem nilai ini terbentuk setelah melalui proses yang panjang dengan menerima berbagai faktor yang otonom maupun heteronom. Faktor otonom adalah faktor dari dalam dirinya, misalnya unsur genetis, juga kesehatan fisik dan rohaninya. Sebaliknya, faktor heteronom adalah faktor dari luar dirinya, seperti latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal, pendidikan di sekolah, agama, dan ideologi negara.

Mengingat sistem nilai juga dipengaruhi oleh faktor heteronom, berarti untuk satu lingkup masyarakat yang memiliki faktor heteronom yang sama, besar kemungkinan memiliki pula sistem nilai yang sama. Artinya, di luar sistem nilai individu, terdapat pula sistem nilai sosial. Katakanlah, untuk masyarakat Jakarta, penilaian mereka tentang makna "kaya" tentu akan berbeda dengan saudara-saudara sebangsa mereka di pedalaman Irian Jaya. Demikian juga dengan penilaian tentang adil, indah, bersih, sehat, dan sebagainya.

Di atas telah disinggung, bahwa nilai dan sistem nilai dipengaruhi oleh faktor otonom dan heteronom. Sampai di sini sebenarnya kita sudah memasuki pembahasan tentang sumber nilai. Khusus mengenai hal ini, ada banyak teori yang berusaha menjawab pertanyaan dari mana nilai itu sesungguhnya berasal.

Teori paling awal menyatakan semua nilai yang ada bersumber dari satu nilai lain yang lebih tinggi derajatnya. Nilai yang lebih tinggi ini dijelaskan dengan banyak sebutan yang berbau transendental, misalnya sebagai kehendak para dewa (*the will of gods*), jiwa alam (*the world soul*), hasrat jiwa (*yearnings of the soul*), causa prima (*the final cause*), bidang ide-ide (*the realm of ideas*).⁶

Para tokoh idealis modern juga cenderung menekankan pada sisi objektif dari nilai. Mereka lebih mengidentifikasikan nilai dengan sesuatu yang lebih dekat kepada kita, tanpa menghilangkan konsepsi nilai seperti yang telah disebutkan di atas. Nilai diidentifikasikan antara lain sebagai aturan alam (*the order of universe*), rasionalitas kosmis (*cosmic ratio-*

⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

nality), atau bahkan sifat ketuhanan dalam diri manusia (*the divine within us*). Menurut penafsiran mereka, sumber utama nilai terletak pada sesuatu di luar diri manusia. Kita tidak menciptakannya, namun hanya menemukannya. Beberapa tokoh idealis memberikan kesimpulan yang umum tentang itu. Misalnya W.M. Urban menyatakan, bahwa nilai dan realitas tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Juga A.N. Whitehead dalam bukunya *Religion in the Making* menyebut nilai sebagai sesuatu yang inheren di dalam aktualitas itu sendiri. Tokoh idealis yang lain, misalnya pemikir Inggris Bernard Bosanquet berpendapat, bahwa nilai, adalah kualitas tertentu dari objek, khususnya sebagaimana hal itu dimanifestasikan dalam sikap batin manusia.⁷

Pandangan kaum idealis ini telah menyumbangkan pemikiran tentang sumber nilai dari sudut yang lebih objektif, namun tidak dapat disimpulkan sebagai pandangan yang selamanya tepat. Seperti telah disinggung di muka, dalam banyak hal, nilai lebih bersifat subjektif daripada objektif.

Terlepas dari pendapat tersebut, teori tentang sumber nilai dapat disebutkan di sini tiga sumber dari nilai. Pertama, teori yang menyatakan sesuatu itu bernilai atau tidak ditentukan oleh kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan kualitas dari sesuatu itu. Teori ini memang dapat menjelaskan dengan baik tentang nilai dasar, tetapi menghadapi kesukaran tentang nilai instrumental dan praksis. Di samping itu, banyak sekali masalah-masalah nilai yang muncul kemudian, yang sulit dicari rujukannya dalam kitab-kitab suci, yang tentu saja menimbulkan kontroversi tentang baik-buruk alternatif penyelesaiannya. Kontroversi ini tidak saja terjadi dalam dialog antaragama, namun kerap timbul dalam kalangan intern agama yang sama.

Teori lain tentang sumber nilai menyatakan, bahwa nilai berasal dari suara hati nurani manusia. Apa yang baik dan tidak baik, indah-tidak indah, berpulang kepada hati nurani masing-masing. Suara hati tidak identik dengan perasaan karena perasaan itu identik dengan subjektivitas. Seperti yang dikatakan oleh Magnis-Suseno, suara hati adalah kesadaran akan kewajiban kita dalam situasi konkret.⁸ Jadi, suara hatipun dapat saja objektif. Suara hati itu harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan rasional.

Pendapat bahwa suara hati dapat objektif, dibantah oleh sebagian filsuf yang digolongkan sebagai penganut emotivisme. Mereka mengatakan, bahwa apapun yang dipakai, suara hati tetap tidak lepas dari perasaan. Penilaian benar atau salah, baik atau tidak baik, bergantung pada ungkapan sikap orang terhadap suatu peristiwa.⁹ Untuk

⁷ *Ibid.*

⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cct. 3, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 63.

⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

mengatasi ketidakpuasan atas teori tentang suara hati ini, lalu dijawab dengan munculnya teori yang lebih belakangan, yang menyatakan sumber nilai adalah aturan alam atau rasionalitas kosmos.

Apapun pendapat tentang sumber nilai, yang jelas nilai yang itu memang mengandung pengertian yang abstrak. Nilai memang suatu kualitas, akan tetapi sulit menerangkan apakah yang disebut "kualitas" itu karena demikian luas maknanya, juga demikian personal sifatnya. Sesuatu dikatakan bernilai bergantung pada bagaimana proses kehidupan yang dijalani seorang manusia.

Nilai atau sistem nilai yang dianut seseorang atau suatu masyarakat mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, nilai merupakan hasil dari suatu proses interaksi manusia dalam kehidupannya. Dalam proses tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Kedua, nilai selalu berkaitan dengan kepentingan dari yang bersangkutan. Nilai dengan demikian merupakan responsi yang dibuat seseorang atau suatu masyarakat dengan bertitik tolak dari kepentingannya masing-masing.

Ketiga, nilai yang diyakini tersebut tidak selalu berada dalam dataran yang sama. Nilai pun memiliki hirarki. Ada nilai yang demikian tertanam dalam pribadi seseorang, tetapi ada pula yang tidak begitu dalam diyakini. Karakteristik nilai ketiga ini ditentukan oleh karakteristik pertama dan kedua.

Selanjutnya, keempat, nilai-nilai yang ada dalam sistem nilai itu tidak selamanya sejalan. Dalam situasi tertentu seseorang atau suatu masyarakat berhadapan dengan dua nilai yang bertolak belakang, yang sama-sama dianutnya. Nilai yang mana yang diambil ditentukan oleh karakteristik nilai pertama, kedua, dan ketiga.

III. NILAI DAN KEBENARAN

Dari uraian sebelumnya, dapat segera disimpulkan bahwa nilai merupakan hasil dari suatu proses pertimbangan yang dapat sederhana, tetapi dapat pula tidak. Sekalipun demikian, sesederhana apapun prosesnya, nilai (yang dihasilkannya) adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh manusia yang bersangkutan.

Mengingat karakteristik nilai-nilai yang tidak selalu seiring sejalan dalam suatu sistem nilai, manusia seringkali menjadi ragu-ragu dengan kebenaran nilai yang semula diyakininya. Situasi demikian dalam skala makro dapat diamati dalam perkembangan dunia filsafat.

Ketika filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Thales, Anaximander, dan Anaximenes pertama kali memperkenalkan pendekatan akal untuk menjawab rahasia-rahasia alam, mitos-mitos yang telah menjadi semacam "agama" bagi orang Yunani, bergoncang hebat. Manusia seperti

disadarkan dari tidur panjang. Mitologi harus ditinggalkan karena dengan akalinya, manusia dapat menjawab permasalahan apa saja. Kepercayaan yang terlalu besar terhadap akal ternyata justru menjadi bumerang karena ternyata akal-akal yang banyak itu justru memberi jawaban yang kontradiktif. Masing-masing mampu berargumentasi secara meyakinkan. Mencermati keadaan ini, kaum Sofisme secara gamblang lalu menyimpulkan, bahwa kebenaran mutlak itu tidak ada. Manusiapun seperti layang-layang putus tali, karena akal tidak mampu memuaskan hati, sementara "agama" telah pula ditinggalkan.

Sementara manusia masih gamang, kaum rohaniawan mulai menduduki posisi penting dalam percaturan politik di Eropa. Gereja mendominasi kekuasaan dan akal harus tunduk pada monopoli "kebenaran" agama. Perkembangan ilmu dan filsafat dikontrol secara ketat oleh agama sepanjang Abad Pertengahan. Bahkan ada pemuka agama yang dengan ekstrem memurtadkan ilmu dan filsafat. Korban-korban berjatuhan!

Akhirnya, masa kegelapan sepanjang sebelas abad itu berakhir juga. Dominasi kebenaran yang dipegang Gereja berhasil diambil alih kembali oleh para ilmuwan dan filsuf. Salah satu tonggak penting "pemberontakan" mengakhiri Abad Pertengahan adalah Revolusi Copernicus dalam dunia astronomi. Sekalipun revolusi ini bermula dari perubahan paradigma di bidang astronomi (geosentris ke heliosentris), Copernicus berhasil menanamkan cara berpikir yang lain daripada masa-masa sebelumnya, yang kemudian dimatangkan oleh tokoh-tokoh lainnya, antara lain oleh Bapak Filsafat Modern, René Descartes.

Ilmuwan sekaligus filsuf besar bermunculan, dan akal kembali mendominasi kebenaran. Kaum Rasionalisme dan Idealisme yang menafikkan benda-benda fisik berhadapan dengan kaum Empirisme yang menolak eksistensi benda-benda nonfisik (substansi). Padahal, mereka semua sepakat memutlakkan kuasa akal. Tragedi masa Sofisme kembali terjadi, dan kali ini diwakili oleh *Skeptisisme* dari David Hume. Ia menyimpulkan, bahwa ilmu dan filsafat tidak dapat melahirkan kepastian dan tidak pernah melebihi taraf probabilitas.

Pengaruh *Skeptisisme* yang merelatifkan akal dan akidah agamawi berhasil diredam oleh Immanuel Kant dengan *Kritisisme*-nya. Keadaan yang merelatifkan kebenaran, menurut Kant, terjadi karena kesalahan manusia yang tidak berani berpikir sendiri (*sapere aude*).

Langkah pertama yang dilakukan Kant adalah menyusun argumen untuk menyelamatkan ilmu, sebagaimana pernah dilakukan oleh Sokrates. Kant mencoba mendamaikan pandangan kaum Rasionalisme dan Empirisme. Rasionalisme mementingkan unsur-unsur apriori dalam pengenalan, sedangkan Empirisme pada unsur aposteriori. Keduanya, menurut Kant, bersifat antinomis. Sekalipun demikian, Kant tetap meyakini bahwa kebenaran ilmu harus berpegang pada dasar-dasar apriori.

Padahal, landasan apriori demikian telah membawa ilmu keluar dari arcanya sendiri, dan mulai memasuki wilayah filsafat.¹⁰ Nilai kebenaran dalam ilmu tidak dapat diuji dengan logika filsafat, karena hasilnya akan menjadi relatif pula. Kebenaran filsafat bertolak dari keogisan argumennya. Sekalipun sama-sama logis, dengan derajat kebenaran konklusi yang sama, isi dari konklusi itu dapat saja berbeda atau bertolak belakang. Logika memang menghasilkan konklusi yang benar, tetapi sifatnya relatif. Relatif sesuai dengan alur argumennya masing-masing.

Demikian pula halnya dengan dunia ilmu yang memiliki ukuran kebenarannya sendiri. Kebenaran ilmu dinilai melalui rasionalitas dan bukti-bukti empirisnya, yang dapat dicari dan diukur hubungan kausalitas antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

IV. KEBENARAN RELATIF-PROPORSIONAL

Mungkin orang segera dapat menyimpulkan, bahwa sebegitu jauh usaha Kant untuk mendamaikan Rasionalisme dan Empirisme, akhirnya berujung pada kebenaran yang relatif juga. Kesimpulan demikian lalu mengembalikan orang kepada Skeptisisme kaum Sofisme yang tidak memutlakkan kebenaran.

Untuk menghindari kesan skeptis terhadap kebenaran, barangkali lebih baik untuk menambahkan unsur relatif kebenaran itu dengan sifat proporsional. Tingkat proporsional nilai tersebut kembali bergantung pada kepentingan manusia. Kepentingan manusia yang bermacam-macam itulah yang menjadi lensa untuk menilai sesuatu benar atau tidak.

Di atas telah disinggung bahwa kebenaran ilmu tidak dapat diuji dengan filsafat karena dasar-dasar penilaiannya berbeda. Sudut pandang keduanya berbeda, dan kepentingannya pun berbeda. Untuk menilai kebenaran filsafat sebaiknya digunakan lensa seorang filsuf, demikian juga apabila ingin menilai kebenaran ilmu, seyogianya dipakai lensa seorang ilmuwan (*scientist*).

Tragedi Abad Pertengahan seharusnya juga tidak perlu terjadi apabila ada kearifan untuk menilai kebenaran secara proporsional. Kebenaran yang diintroduksi oleh kaum agamawan dapat saja berbeda dengan kebenaran kaum ilmuwan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, bahkan sebaliknya, yang satu merupakan komplemen bagi yang lain. Agama berangkat dari rasa percaya terlebih dulu, baru kemudian mencoba mencari justifikasi. Sebaliknya dengan ilmu, yang mulai dari keraguan dan rasa tidak percaya.

¹⁰ Lihat lebih lanjut: Ahmad Tafsir, *Akal dan Hati sejak Thales sampai James*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, hlm. 219 et seqq., dan F.X. Mudji Sutrisno & F. Budi Hardiman, ed., *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 63 et seqq.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia juga menggunakan indera dan intuisinya untuk menilai. Hasil penilaian itu adalah kebenaran pula, tetapi kebenaran yang proporsional. Untuk mengetahui apakah ada pisau di dapur, seorang ibu rumah tangga tentu tidak perlu menggunakan metode berpikir Descartes. Ibu tadi cukup menggunakan indera penglihatannya, dan kebenaran demikian sudah cukup memadai untuk kepentingan dirinya.

Kebenaran indera memang dapat saja dipertanyakan, misalnya: benarkah gunung yang terlihat di kejauhan itu sungguh-sungguh berwarna biru; benarkah rel kereta api yang membentang lurus ke depan kita itu tampak semakin menjauh semakin menyempit; atau benarkah tiang-tiang listrik yang berbaris sepanjang jalan yang lurus di depan kita itu semakin jauh semakin pendek? Kita tentu sepakat, bahwa gunung itu memang terlihat membiru dari kejauhan, tetapi warna sebenarnya tidaklah demikian. Juga rel kereta api dan tiang-tiang listrik itu tetap pada ukuran yang sama, walaupun tampak semakin menyempit dan memendek. Pertanyaan-pertanyaan demikian tidak lagi menjadi porsi indera untuk menjawabnya, sehingga akan sia-sia menilainya benar atau tidak benar melalui indera penglihatan kita. Untuk menjawabnya, kita serahkan kepada ilmu, karena memang masalahnya sudah berada dalam wilayah ilmu.

Situasi yang sama juga terjadi pada kebenaran intuisi. Orang-orang yang mengaku diri mereka penganut Rasionalisme, sering malu untuk mempercayai hal-hal yang intuitif. Padahal, dalam keterbatasan daya upaya, orang-orang seperti ini kadang-kadang "terpaksa" harus menerima kebenaran intuisi tersebut. Manusia dilengkapi Tuhan dengan intuisi, dan manusia menggunakan intuisi itu sebagai salah satu alat untuk membela kepentingannya. Orang-orang Aborigin, misalnya, kerap kali diminta bantuannya untuk mencari jejak penduduk yang tersesat di pedalaman Australia. Mereka melakukan semua itu dengan bantuan kepekaan inderawi, dan sebagian besar dengan intuisi yang terlatih secara turun-temurun. Keberhasilan mereka melaksanakan banyak tugas demikian, tentu tidak dapat lagi dianggap sebagai kebetulan semata.

Intuisi juga perlu mendapat tempat karena dinamika kehidupan senantiasa menuntut manusia — suka atau tidak suka — untuk mengambil keputusan atas suatu permasalahan. Jika alternatif pemecahan yang ada bersifat dilematis, Katakanlah sama-sama logis dan rasional, tetapi sama besar pula risikonya, maka manusia sering harus meminta bantuan intuisi untuk menetapkan pilihannya. Politisi dan usahawan yang handal biasanya memiliki kemampuan intuisi yang tajam.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa kebenaran itu memang proporsional. Kearifan bersikap dan bertindak berdasarkan kerangka berpikir kebenaran proporsional ini sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertentangkan satu dengan yang lain justru akan menghabiskan energi karena — sejarah telah membuktikan — usaha demikian sia-sia belaka. Jika terus dipaksakan, manusia akan terjebak dalam pandangan sofistis dan skeptis yang berbahaya. Manusia menjadi anarkis karena menganggap tidak ada lagi suatu pegangan kebenaran yang pasti, termasuk di antaranya terhadap agama dan hukum positif yang berlaku.

Kerangka berpikir kebenaran yang proporsional juga tidak bertentangan dengan "kebenaran mutlak" yang diyakini melekat pada agama. Dalam agama Islam, misalnya, diajarkan agar seorang hakim berani memutuskan perkara melalui ijtihad yang ikhlas dengan nilai-nilai kebenaran yang diyakininya. Apabila ternyata di kemudian hari putusannya keliru, sang hakim tetap mendapat ganjaran pahala dari Tuhannya.¹¹ Ajaran ini memang berada dalam konteks internal akidah Islamiah, sehingga pengertian ganjaran pahala dari Tuhan inipun harus dilihat dalam konteks akidah tersebut.

Apabila dikaitkan dengan topik tulisan ini, ajaran yang disebutkan di atas dapat ditarik dalam dimensi yang lebih luas, bahwa manusia harus memiliki keberanian memberi penilaian secara benar menurut keyakinannya sendiri.¹² Apabila meminjam istilah Kant, inilah yang disebutnya dengan menilai menurut suara hati yang imperatif.

Dalam rangka keharmonisan antarumat beragama, "kebenaran" masing-masing agama tidak perlu dipertentangkan, walaupun dalam kenyataannya nilai-nilai kebenaran itu mungkin kontradiktif. Walaupun agama bukan wilayah yang netral, dan juga sangat sensitif untuk didiskusikan, alangkah baiknya jika setiap manusia Indonesia dapat menjadi "hakim" yang ikhlas dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya bertolak dari sistem nilai yang diyakininya, dan berpegang pada suara hatinya yang imperatif itu. Ia mungkin saja keliru dengan keputusan atau pilihannya, tetapi kekeliruannya itu berada dalam konteks keyakinannya sendiri dan dirinya pula yang akan mempertanggungjawabkannya berdasarkan akidah keagamaannya masing-masing.

Kerangka yang sama juga dapat dikembangkan untuk mengatasi arogansi sektoral antardisiplin ilmu yang makin mengkhawatirkan dewasa ini. Demikian juga dengan alienasi antara ilmu dan teknologi, ilmu dan filsafat, ilmu dan intuisi, dan seterusnya.

Tiap-tiap bidang memiliki tempatnya sendiri-sendiri, dan kita tidak perlu membuat peringkat mana yang lebih tinggi daripada yang lain. Apa yang pernah dilakukan oleh August Comte dengan menempatkan teologi (termasuk agama) pada tingkatan perkembangan penalaran terendah dibandingkan dengan penalaran metafisik dan positif, terbukti sama sekali keliru.¹³

¹¹ Hal ini tercantum dalam Hadist: Dari 'Amr bin al-Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang hakim menghukum dengan ijtihad dan setuju dengan kebenaran, maka ia mendapat dua ganjaran; dan apabila ia menghukum dengan ijtihadnya, tetapi ia keliru, maka ia mendapat satu ganjaran." Lihat: Ibnu Hajar 'Al-Aswalani, *Bulughul-Maram* (terjemahan A. Hassan), Jilid II, Cet. 11, Bandung: Diponegoro, 1985, hlm. 687.

¹² Apakah Tuhan akan memberi pahala atau tidak atas pilihan tersebut harus dibaca dalam konteks akidah masing-masing agama.

¹³ Ketiga bentuk penalaran itu tidak bersifat evolutif. Ketiganya dapat eksis secara bersamaan dalam kurun waktu dan masyarakat yang sama, bahkan dipraktikkan secara bergantian oleh seseorang dengan atau tanpa disadarinya. Lihat H.M. Rasjidi, *Empat Kuliyah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm. 7-23.

Manusia mempunyai aneka potensi untuk melakukan penilaian. Semua potensi itu, apakah itu indera, intuisi, akal, rasio, iman, semuanya wajib dikembangkan seluas-luasnya. Penggunaannya potensi-potensi tersebut harus proporsional dan disesuaikan dengan konteks permasalahannya. Hanya dengan cara demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara harmonis (selaras, serasi, dan seimbang).

V. PENUTUP

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, salah satu tujuan hukum adalah menjaga keharmonisan hidup antarpribadi. Tentu saja, modal awalnya harus terlebih dulu muncul dari kehidupan pribadi-pribadi yang harmonis. Kehidupan pribadi yang harmonis diperoleh dari proses menilai (mencari kebenaran) secara proporsional. Proses menilai itu bermacam-macam, dan hasilnya pun dapat pula berbeda, bergantung pada kebutuhannya. Kendati begitu, proses menilai itu harus berjalan dengan penuh kejujuran, tanpa manipulasi. Di sinilah suara hati manusia berperan penting.

Selanjutnya, pada bagian akhir tulisan ini akan ditutup dengan satu pertanyaan sederhana, yakni: apa yang dapat dilakukan untuk mendorong orang berani menilai menurut keyakinan dan suara hatinya sendiri? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut bisa dideretkan dalam berhalaman-halaman kertas. Masing-masing jawaban adalah benar menurut alur argumennya sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan manusia yang memberikan jawaban itu.

Salah satu jawaban di antara sekian jawaban yang ada ialah keberanian memulai, dalam lingkup sekecil apapun, untuk memberikan keleluasaan bersikap dan berperilaku pada diri kita sendiri dan manusia-manusia lain di sekitar kita. Keleluasaan itu bukan kebebasan tanpa batas yang cenderung anarkis, tetapi kebebasan berlandaskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya.

Mengingat sistem nilai muncul melalui proses interaksi manusia dalam kehidupannya, bersifat hirarkis, dan tunduk pada kepentingan manusia, maka keputusan memilih nilai mana yang dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku diserahkan pada suara hati yang imperatif.

Suara hati mungkin keliru, tetapi hal itu jauh lebih baik daripada manusia tidak berani bersikap (apatis) atau tidak mengambil tindakan apa-apa dalam menjalani kehidupannya (nihilistik). Kekeliruan membuat keputusan disebabkan tidak validnya informasi atau masukan! Di sinilah terutama letak peran kaum ilmuwan, filsuf, dan agamawan, yakni memberikan informasi yang akurat, jelas, dan proporsional.